

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya Q.S Yusuf: 75-76 dan Q.S Al-Anfal: 27.

B. Buku

Arifianti, I. (2024). Perlokusi Direktif Teori Ika Valensia pada Tuturan Interogasi Penyidik Polri. Cahya Ghani Recovery.

Hadiyanto, A., & Budiman, H. (2023). Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam.

Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.

Mulyawan, D. (2017). Jurus Anti Tipu-Tipu: Modus-Modus Penipuan Bisnis yang Wajib Anda Ketahui dan Hindari. Elex Media Komputindo.

Nasihuddin, A. A., SH, M., Wibowo, M. E. A., Sulyanati, K. W. S., Utami, N. A. T., Alam, K., ... & Arisanti, T. (2024). Teori Hukum Pancasila. *Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana*.

Sadjijono. (2008). *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Situmorang, L. H. (2016). Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum. ., 1-13.

Soebroto. (2004). *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia* . Jakarta: Bunga Rampai PTIK.

Solehoddin, S. H. (2023). Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana dan Perdata.

Stokes, J. (2006). *How to do media and cultural studies: Panduan untuk melaksanakan penelitian dalam kajian media dan budaya*. Bentang

Pustaka.

- Sumaryono, E. (2002). *Etika dan hukum: Relevansi teori hukum kodrat Thomas Aquinas*. PT Kanisius.
- Suparlan, P. (2003). *Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian*. Jakarta: Jurnal Book Polisi Indonesia, Edisi X Bulan September 2007.
- Syamsuddin, A. (2008). *Integritas penegak hukum: hakim, jaksa, polisi, dan pengacara*. Penerbit Buku Kompas.
- Thalibul Ilmi Publishing & Education. Wajdi, F., & Hasanuddin, M. I. (2022). *Pengawasan hakim dan penegakan kode etik di Komisi Yudisial*. Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika, 2020.
- Yahman, S. H. (2017). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Prenada Media.
- Yuwono, I. D. (2011). *Memahami berbagai etika profesi dan pekerjaan*. MediaPressindo.

C. Jurnal

- Arifin, Z., & Santoso, D. (2021). "Penegakan Kode Etik Profesi Polri dalam Kasus Tindak Pidana oleh Anggota Polri." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(2), 45-58.
- Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2019). *Gagasan Perluasan Lembaga Negara sebagai Pihak Pemohon dalam Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 181.
- Budiarta, G., Lemes, I. N., & Mandala, S. (2021). *Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng*.
- Christian, A. (2023). *Analisis pelanggaran kode etik profesi POLRI sebagai*

- lembaga penegak hukum di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(2).
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19.
- Kertha Widya, 9(1), 73-98. Menghapuskan, P. D. E. T., & Melakukan, P. A. P. Y. (2023). JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. Manurung, K. H., & Lewoleba, K. K. (2023). Penerapan Sanksi Etika Profesi Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pemerasan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Nugroho, R. P. (2020). "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penipuan Rekrutmen Pegawai." *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 5(1), 123-137.
- Pohan, M. N., Hidayani, S., & Munawir, Z. (2021). Tinjauan Hukum tentang kecakapan tahanan dalam Penandatanganan Akta Notaris di Rumah Tahanan. *Jurnal Normatif*, 1(2), 72-76.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Setiawan, A., & Putri, R. (2022). "Evaluasi Penerapan Kode Etik Profesi Polri dalam Kasus Pelanggaran Integritas Anggota." *Jurnal Etika Profesi dan Hukum*, 7(4), 102-115.
- Simamora, J. (2016). Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 77-92.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Wijaya, A., & Haryanto, B. (2020). "Efektivitas Penegakan Kode Etik dalam Menangani Kasus Penipuan Rekrutmen pada Instansi Publik." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 6(1), 98-110.
- Yuliana, I., & Pratama, M. (2019). "Peranan Polri dalam Penanganan Kasus Penipuan Penerimaan Pegawai BUMN." *Jurnal Sosial dan Hukum*, 4(3), 210-225.

D. Undang-Undang Negara Republik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Tertentu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.